

PENGUATAN STRATEGI PERTAHANAN LAUT WILAYAH LANAL BANTEN MELALUI PENDAYAGUNAAN TRAFFIC SEPARATION SCHEME DI SELAT SUNDA

STRENGTHENING THE MARINE DEFENSE STRATEGY OF LANAL BANTEN AREA THROUGH EMPOWERMENT THE TRAFFIC SEPARATION SCHEME IN THE SUNDA STRAIT

Mohamad Rachmad, Ansori Zaeni, Ernalem Bangun

STRATEGI PERTAHANAN LAUT, FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN, UNIVERSITAS
PERTAHANAN

(moat1402@gmail.com, anszaini@gmail.com, ernabangun@yahoo.com)

Abstrak– Indonesia sebagai negara kepulauan dikaruniai Tuhan dengan letak geografis yang berada di antara dua benua dan juga dua samudera sehingga menjadikan posisi Indonesia sangat strategis. Sesuai dengan UNCLOS 1982, sebagai negara kepulauan Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyediakan jalur pelayaran yang disebut ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). ALKI 1 terbentang mulai dari Selat Malaka hingga menuju ke Selat Sunda, Selat Sunda sebagai salah satu jalur pelayaran yang ramai rentan terhadap berbagai bentuk ancaman. Untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Sunda maka ditetapkan TSS Selat Sunda sebagai alur pemisah jalur pelayaran. Dengan penetapan TSS Selat Sunda maka pelayaran yang menggunakan Selat Sunda akan semakin ramai, hal ini akan menimbulkan ancaman yang semakin besar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penguatan strategi pertahanan laut di Selat Sunda yang dilakukan Lanal Banten melalui pendayagunaan TSS Selat Sunda. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter Van Horn dan teori strategi dari Lykke. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana serta belum adanya operasi khusus yang digelar oleh TNI AL untuk pengamanan Selat Sunda, sehingga pelaksanaan penguatan strategi pertahanan laut di Selat Sunda belum maksimal. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana maupun dukungan operasi khusus di Selat Sunda untuk penguatan strategi pertahanan laut di Selat Sunda serta partisipasi masyarakat sekitar Selat Sunda.

Kata Kunci: ALKI, Strategi pertahanan laut, *Traffic Separation Scheme*(TSS) Selat Sunda, PMD (Poros Maritim Dunia), Negara Kepulauan

Abstract – Indonesia as an archipelagic country is gifted by God with a geographical location between two continents and also two oceans, making Indonesia's position very strategic. In accordance with UNCLOS 1982, as an archipelagic country, Indonesia has an obligation to provide a shipping route called ALKI (Indonesian Archipelago Sea Channel). ALKI 1 stretches from the Malacca Strait to the Sunda Strait. The Sunda Strait as one of the busy shipping lanes is vulnerable to various forms of threats. To ensure the safety of shipping in the Sunda Strait, the TSS of the Sunda Strait is designated as a shipping lane separating channel. With the determination of the TSS of the Sunda Strait, shipping using the Sunda Strait will be increasingly crowded, this will pose an even greater threat. The purpose of this study was to analyze the strengthening of the marine defense strategy in the Sunda Strait carried out by Lanal Banten by utilizing the TSS of the Sunda Strait. The method used in this research is descriptive qualitative research using the theory of policy implementation from Van Meter Van Horn and strategy theory from Lykke. The results of the study indicate that the lack of facilities and infrastructure and the absence of a special operation carried out by the Indonesian Navy to secure the Sunda Strait, so

that the implementation of strengthening the marine defense strategy in the Sunda Strait has not been optimal. There needs to be support for facilities and infrastructure as well as support for special operations in the Sunda Strait to strengthen the maritime defense strategy in the Sunda Strait and the participation of the people around the Sunda Strait.

Keywords: *Indonesian Archipelagic Sea Lanes, Marine defense strategy, Sunda Strait Traffic Separation Scheme, World Maritime Axis, Archipelago Countries*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan dikaruniai Tuhan dengan letak geografis yang berada di antara dua benua dan juga dua samudera sehingga menjadikan posisi Indonesia sangat strategis. Perairan Indonesia dilewati oleh kapal-kapal yang akan melintas baik untuk perdagangan maupun untuk kegiatan lainnya. Kepentingan dunia akan perairan Indonesia dapat kita lihat di mana Jepang sebagai negara industri delapan puluh persen bahan baku begitu juga hasil industrinya dikapalkan melewati perairan Indonesia, batu bara dan biji besi yang berasal dari Australia di ekspor ke negara tujuannya melalui perairan Indonesia, negara-negara timur tengah sebagai pengeksport minyak menggunakan kapal tangker melewati perairan Indonesia juga, dalam kepentingan militer, kapal perang China, Amerika Serikat, Rusia, India, serta negara-negara lain membutuhkan perairan Indonesia dalam melakukan lintas navigasi. Pada konvensi

Internasional *Law Of The Sea Convention* (LOSC) atau yang kita kenal sebagai *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* tahun 1982 yang kita kenal sebagai konvensi PBB yang membahas tentang Hukum laut Internasional tahun 1982, Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan.

Sesuai dengan perjanjian tersebut Indonesia memiliki kedaulatan di laut yang diakui oleh dunia Internasional yang harus memperhatikan hak yang dimiliki oleh negara lain dalam hal hak lintas damai sehingga Indonesia harus menyediakan alur pelayaran internasional yang kita sebut ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) sebagai alur pelayaran laut yang dapat digunakan. Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan, sesuai dengan UNCLOS 1982 yang diterangkan dalam pasal 46 hingga pasal 53. Pada pasal tersebut Indonesia dapat menentukan alur pelayaran yang dapat dipergunakan oleh kapal asing dalam melakukan pelayaran lintas damai. Pada jalur pelayaran Indonesia terdapat 4

Choke point, salah satu *choke point* yang dimiliki Indonesia adalah Selat Sunda (Marsetio, 2014). Dengan posisi geografis yang strategis Selat Sunda merupakan selat yang ramai dan dilewati oleh banyak kapal untuk berlayar, setiap tahunnya ada 70.000 unit kapal yang melintas Selat Sunda (Kemenhub, 2017). Sebagai salah satu selat dengan lalu lintas yang ramai dan juga merupakan jalur masuknya pelayaran kapal internasional yang akan menggunakan ALKI 1 Selat Sunda menjadi jalur utama perdagangan antara benua Australia dan benua Asia. Dengan ramainya kapal yang melintas Selat Sunda banyak sekali ancaman dan gangguan. Bukan saja ancaman Navigasi namun juga ancaman lainnya yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bangsa, salah satunya adalah penyelundupan narkoba. pada tahun 2016 penyelundupan narkoba berupa shabu-shabu seberat 54 kg dan pil ekstasi sebanyak 40.894 telah berhasil digagalkan oleh Polri di pelabuhan (Indonesia, 2017). Pada bulan Juli 2017 penangkapan yang dilakukan Polri kepada penyelundup sabu sebanyak 1 ton, menggunakan jalur mulai dari Laut Cina Selatan lalu ke Johor, kemudian menyusuri pantai bagian barat hingga masuk ke Selat Sunda (Badriyanto, 2017).

Selat sunda juga menjadi ajang untuk unjuk kemampuan Inggris yang akan melakukan “*Show of Force*” pada tanggal 24 Agustus 1964 menggunakan HMS Victorious dengan kawalan dua kapal distroyer melakukan pelayaran dari Singapura menuju Australia dengan menggunakan jalur Selat Sunda tanpa ijin (Ajinugroha, 2020) kepada Indonesia walaupun akhirnya Indonesia mampu menggagalkannya. Selain itu juga posisi Selat Sunda sangat dekat dengan Ibu Kota Negara sehingga memiliki eskalasi potensi ancaman yang sangat tinggi (Suhirwan & Prakoso, 2019). Dilihat dari situasi diatas maka Selat Sunda merupakan suatu peluang dan juga tantangan yang harus dapat dijawab agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bangsa Indonesia. Untuk menangani permasalahan tersebut perlu adanya strategi yang harus diambil demi untuk memperkuat pengawasan dan mengurangi ancaman serta gangguan yang akan ditimbulkan di Selat Sunda.

Pertahanan sebagai salah satu fungsi pemerintahan untuk mencapai cita-cita negara dengan mewujudkan kesatuan dan persatuan negara untuk mencapai tujuan bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara,

2002). Penguatan pertahanan di Selat Sunda perlu ditingkatkan dan bisa dijadikan salah satu strategi yang berguna untuk menjaga kedaulatan bangsa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif, pada proses penelitian kualitatif tidak memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi data sehingga bertujuan agar memperoleh data yang sesungguhnya dalam kondisi yang alamiah. Pada penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan tertentu, membuat manipulasi atau melakukan perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan memberi gambaran tentang kondisi yang sebenar-benarnya

(Bungin, 2007). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implimentasi menurut Van Meter dan Van Horn tentang model pendekatan implementasi kebijakan (Agostino, 2006), dan teori strategi dari Lykke (Lykke Jr, 1989).

Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada narasumber, yang merupakan personel yang ditunjuk oleh pejabat masing-masing instansi dan memiliki kompetensi pada bidangnya, sehingga tujuan peneliti untuk mendapatkan informasi dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun narasumber yang dapat diwawancarai adalah yaitu :

Tabel 1. Daftar Narasumber

No	Jabatan	Kode	Instansi
1	2	3	4
1	Kasi Operasi dan Survei Subdit Telekomunikasi Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	1A	Kementerian Perhubungan
2	Pabandya Opsga Koarmada 1	1B	TNI AL
3	Kasi SIG Disnautika Pushidrosal	1C	TNI AL
4	Kasubrenmin Ditpolair Polda Banten	1D	Polri
5	Palaksa Lanal Banten	2B	TNI AL
6	Komandan KAL Anyer	3B	TNI AL

Sumber: diolah peneliti, 2021

Hasil dan Pembahasan Strategi pertahanan laut di Selat Sunda yang dilakukan saat ini

Strategi pertahanan laut di Selat Sunda telah dilaksanakan, saat ini pengamanan Selat Sunda masuk dalam Operasi Pengamanan ALKI 1 mulai dari Selat Malaka sampai dengan Selat Sunda. Sedangkan *Traffic Separation Scheme (TSS)* Selat Sunda diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2020 (Maritim, 2020), TSS adalah skema pemisah jalur pelayaran dalam suatu alur pelayaran, dimana pada jalur tersebut memiliki lalu lintas yang ramai, sempit dan memiliki banyak hambatan dalam bernavigasi. Penetapan TSS Selat Sunda dalam menjamin keamanan pelayaran kapal yang melintas di Selat Sunda merupakan salah satu implementasi dari Kebijakan Kelautan Indonesia sesuai dengan visi Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Dengan diberlakukannya TSS Selat Sunda maka kapal-kapal yang melintas akan merasa lebih nyaman, karena keamanannya lebih terjamin sehingga akan meningkatkan volume dan aktifitas pelayaran di Selat Sunda. Meningkatnya volume dan aktifitas pelayaran di Selat Sunda akan meningkatkan juga ancaman yang akan muncul di Selat Sunda. Ancaman yang akan muncul bukan hanya

ancaman militer, namun ancaman lainnya yang semakin kompleks dan beragam. Salah satu ancaman yang masih sangat besar adalah peredaran Narkoba yang melalui Selat Sunda. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif yang tidak menggeneralisasikan jawaban penelitian melainkan dengan memperhatikan detail yang ada, dari semua jawaban yang dikemukakan melalui informan dalam pembahasan penelitian telah disesuaikan dengan teori dari Van Meter Van Horn (1975). Teori tersebut menjelaskan tentang implementasi kebijakan penguatan strategi pertahanan laut melalui penetapan TSS di Selat Sunda dipengaruhi oleh variabel-variabel yang sudah peneliti susun.

Hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan adalah :

Pemahaman Tujuan kebijakan

Pada level pelaksana haruslah memahami tentang maksud secara umum dari suatu tujuan kebijakan. Tujuan dari kebijakan tersebut harus tersampaikan dan dipahami oleh setiap implementator di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, para pelaksana kebijakan dalam hal ini anggota Lanal Banten,

anggota KAL Anyer, Ditpolair Polda Banten, Pengawak VTS Merak, memahami tentang tujuan kebijakan dalam hal ini penetapan TSS Selat Sunda merupakan salah satu cara untuk menguatkan strategi pertahanan laut di Selat Sunda.

Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan keberhasilan dalam mencapai dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan dari hasil penelitian, ditemukan bahwa sarana dan prasarana saat ini yang ada di Selat Sunda terkait penguatan strategi pertahanan laut, masih sangat terbatas, kurangnya sarana kapal patroli terutama kehadiran KRI, terbatasnya radar *Integrated Maritime Surveillance System (IMSS)* yang sangat dibutuhkan dalam rangka membantu melaksanakan operasi di laut, juga sumber daya manusia dalam mendukung operasi di Selat Sunda.

Karakteristik Instansi Pelaksana

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan bahwa instansi TNI AL, Kemenhub, dan Polri dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya menunjukkan karakteristik organisasi yang cocok dengan kebijakan peningkatan strategi pertahanan laut di Selat Sunda. Setiap organisasi diatas

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehari-hari telah melaksanakannya dengan baik.. Namun perlu adanya koordinasi yang baik dalam rangka menjaga pertahanan laut di Selat Sunda.

Komunikasi Antar Instansi Pelaksana

Dari hasil penelitian di lapangan dengan para informan didapatkan bahwa komunikasi dan koordinasi antar instansi yang ada di Selat Sunda terkait dengan penguatan strategi pertahanan laut telah terjalin dengan baik. Bukan saja komunikasi formal tapi juga komunikasi informal yang dilakukan antar instansi. Sehingga pelaksanaan operasional tiap-tiap instansi dapat dilakukan dengan baik. Namun perlu adanya pengintegrasian agar dapat mensinergikan kekuatan laut dan pelaksanaan operasi bersama yang dilakukan di sekitar Selat Sunda.

Sikap Para Pelaksana

Pelaksanaan penguatan strategi pertahanan laut melibatkan banyak instansi dan personel di kawasan Selat Sunda bukan saja satuan militer tapi juga satuan sipil yang ada. Sikap para pelaksana yang melaksanakan kebijakan terkait dengan strategi pertahanan laut telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mereka menjalankan peraturan ketentuan terkait dengan instansi

masing-masing, hal ini tidak lepas dari pemahaman yang mereka terima dan juga mengerti tentang tujuan yang akan dicapai. Dari penelitian yang telah dilaksanakan peneliti menemukan bahwa sikap para pelaksana kebijakan telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan pemahaman tentang tugas yang diberikan, juga pelatihan dan pendidikan yang mereka terima sebelum melaksanakan tugasnya. Dengan sikap tersebut maka kebijakan yang telah diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dalam implementasinya.

Pengaruh Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Keberhasilan suatu kebijakan akan sangat terpengaruh terhadap lingkungan sekitar, apakah lingkungan sosial, ekonomi dan politik mendukung tentang kebijakan tersebut.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan peneliti menemukan bahwa pengaruh lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam rangka memperkuat strategi pertahanan laut melalui penetapan TSS Selat Sunda terlaksana dengan baik. Bukan saja pemerintah dalam hal pembuatan aturan tentang TSS Selat Sunda tetapi masyarakat yang

berada di Selat Sunda dengan mata pencaharian sebagai nelayan merasa terbantu dan mendukung adanya TSS Selat Sunda.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Penguatan Strategi pertahanan Laut Melalui Penetapan TSS Selat Sunda

Berdasarkan hasil dari penelitiandidapatkan bahwa faktor pendukung dalam penguatan strategi pertahanan laut di selat sunda adalah adanya dukungan pemerintah melalui peraturan maupun kebijakan lain terutama Visi PMD, karena dengan kemampuan Indonesia dalam mengelola Selat Sunda merupakan tanda bahwa Indonesia mampu mengelola dan memanfaatkan salah satu sumber daya kelautannya. Selain itu juga dukungan masyarakat yang besar dalam hal ini pengguna Selat Sunda. Dengan adanya TSS Selat Sunda maka dengan sendirinya meningkatkan keselamatan pengguna Selat Sunda. Sedangkan faktor penghambat penguatan strategi pertahanan laut di Selat Sunda antara lain kurangnya sebagian masyarakat pengguna Selat Sunda yaitu nelayan-nelayan kecil yang melaksanakan penangkapan ikan di daerah terlarang sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Tidak adanya

operasi khusus yang di gelar oleh TNI AL dalam rangka pengamanan TSS Selat Sunda, sehingga apabila terjadi ancaman yang berasal dari Selat Sunda akan memakan waktu yang banyak untuk merespon situasi tersebut hal ini terjadi karena kurangnya kehadiran KRI di Selat Sunda. Selain itu juga kurangnya sarana dan prasarana dalam hal ini alat sensor yang dimiliki oleh lanal Banten. Sedangkan yang terakhir kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini pengawak VTS dan personel Lanal Banten.

Pembahasan

Pada UU No.34 tahun 2004 tentang TNI menyebutkan, TNI AL memiliki tugas TNI matra laut di bidang pertahanan. Pelaksanaan pertahanan dilaut merupakan tugas yang dimiliki oleh TNI AL. Untuk mewujudkan tugas tersebut dilakukan berbagai usaha salah satunya adalah penguatan pertahanan laut di Selat Sunda. Penguatan tersebut tidak lepas dari ancaman yang muncul akibat meningkatnya pengguna Selat Sunda setiap tahunnya.

Dalam teori yang disampaikan oleh Ken Booth melalui bukunya yang berjudul “Navies and Foreign Policies” menerangkan bahwa, peran yang dimiliki oleh angkatan laut secara universal

memiliki tiga peran yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yaitu 1). Peran militer; 2). Peran Diplomasi dan; 3). Peran polisionil. Pada peran militer angkatan laut memiliki tugas untuk menegakkan kedaulatan negaranya di laut melalui kekuatan unsur dan pangkalan, mempersiapkan kekuatan dalam menghadapi perang, menangkalkan ancaman militer yang muncul di laut melalui operasi yang di lakukan, melindungi dan menjaga perbatasan di laut dengan negara tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan di kawasan maritim.

Dalam pembahasan penelitian ini akan menjawab rumusan permasalahan yang sudah ditetapkan dengan berpedoman kepada data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai penguatan strategi pertahanan laut Lanal Banten melalui penetapan TSS di Selat Sunda.

Kondisi strategi pertahanan laut di Selat Sunda saat ini setelah penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda

Dengan besarnya wilayah kelautan dan sebagai negara maritim Indonesia sudah sewajarnya dapat secara maksimal memanfaatkan potensi maritimnya untuk kemajuan bangsa (Mustari & Barnas, 2018). Dengan adanya penetapan TSS Selat Sunda diharapkan akan

meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan terhadap lingkungan maritim agar terjaga dengan baik. Selain itu juga penetapan TSS Selat Sunda memberikan penilaian positif kepada Indonesia dan mengangkat nama bangsa Indonesia di dunia internasional dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi poros maritim dunia. Keamanan maritim tidak lagi hanya dilihat sebagai upaya menegakkan keamanan dalam konteks tradisional saja, tetapi juga untuk mewujudkan pemeliharaan tatanan di laut, karena banyak variabel objek kepentingan yang ada di laut, seperti sumber daya alam, sarana transportasi dan aspek lingkungan hidup (Keliat, 2009). Operasi pengamanan yang dilaksanakan di ALKI - I terutama yang dilaksanakan di Selat Sunda menggunakan konsep kedaulatan maritim di perairan Indonesia dimana operasi yang dijalankan saat ini menggunakan konsep Poros Maritim Dunia (Gunawan et al., 2018).

Dari hasil penelitian di lapangan bahwa penguatan strategi pertahanan laut di Selat Sunda belum optimal masih perlu dilakukan peningkatan yakni melalui beberapa variabel pembahasan sebagai berikut :

Pemahaman Terhadap Tujuan Kebijakan

Penetapan TSS diperairan Selat Sunda bertujuan untuk memberikan keamanan dalam navigasi pelayaran. Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah dalam melaksanakan program nawa cita untuk menjadikan Indonesia sebagai PMD. Pada Perpres No.16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Disebutkan pada pasal 1 butir ke dua disebutkan, PMD adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional (Perpres No.16, 2017) Untuk pelaksanaan penguatan strategi pertahanan laut di Selat Sunda yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana pemahaman dari para instansi pelaksana keamanan pertahanan di wilayah Selat Sunda dapat mengerti dan memahami serta mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah terkait kebijakan kelautan Indonesia (KKI) pada faktor kebijakan di poin ke 2 tentang pertahanan keamanan. Dalam kenyataan di lapangan masih ditemukan ada sebagian kecil dari masyarakat nelayan yang menggunakan Selat Sunda sebagai tempat mencari ikan, belum memahami

tentang penetapan TSS Selat Sunda dan penetapan wilayah-wilayah terlarang untuk melakukan kegiatan mengambil ikan. Perlu adanya sosialisasi tentang penetapan TSS Selat Sunda dan tempat-tempat yang tidak dapat digunakan untuk mengambil ikan pada masyarakat nelayan.

Sumber daya

Dalam teori strategi maritim yang disampaikan oleh Alfred Thyer Mahan pada bukunya dengan judul *The Influence of Sea Power Upon History*, menyatakan “*It is easy to say in a general way, that the use and control of the sea is and has been a great factor in the history of the world;* (Mahan., 1987). Bahwa penggunaan dan penguasaan laut adalah faktor yang sangat menentukan dalam sejarah dunia. Strategi maritim adalah penguasaan laut, dengan cara menjamin penggunaan laut untuk kepentingan sendiri serta menutup semua peluang lawan untuk menggunakannya.

Untuk menjaga dan mempertahankan kekayaan alam tersebut kita membutuhkan strategi yang tepat untuk menguasai laut. Untuk itu diperlukan beberapa sumber daya antara lain :

1. Sarana dan Prasarana

Peneliti akan membahas sarana dan prasarana yang dapat mendukung penguatan strategi pertahanan laut di Selat Sunda. Sarana dan prasarana tersebut antara lain adalah kapal patroli dan radar IMSS yang ada di Selat Sunda. Salah satu sarana yang berada di Selat Sunda adalah radar pengamat *Integrated Maritime Surveillance. System* (IMSS). Radar ini berfungsi untuk mempermudah pengawasan kapal-kapal yang melintas di Selat Sunda (Dotulung, 2020). Dari hasil penelitian diketahui bahwa Radar IMSS yang berada di Selat Sunda saat ini mengalami kerusakan.

Selain Radar IMSS salah satu sarana yang dimiliki adalah kapal patroli. Peneliti akan membahas tentang kondisi sarana Lanal Banten dalam hal ini kapal yang berada dibawah jajaran Lanal Banten. Kebutuhan terhadap kapal patroli dalam rangka menciptakan keamanan di Selat Sunda merupakan salah satu faktor yang penting. Selain patroli yang dilaksanakan oleh TNI AL instansi-instansi lain juga

melaksanakan patroli di sekitar Selat Sunda salah satunya adalah Bakamla (Badan Keamanan Laut) dan instansi lainnya. KAL anyer saat ini melaksanakan operasi pengamanan ALKI 1 (Pam ALKI 1), pengamanan Selat Sunda merupakan bagian dari pengamanan ALKI1, Pam ALKI 1 terbentang mulai dari Laut Natuna Utara, Laut Natuna, selat Karimata sampai ke Selat Sunda. Dengan luasnya cakupan operasi Pam Alki 1 KAL Anyer tidak secara terus menerus berada di Selat Sunda sehingga kehadiran unsur kapal TNI AL di Selat Sunda sangat sedikit. Seharusnya untuk memperkuat Strategi pertahanan laut di Selat Sunda dibutuhkan dua kapal yang dapat digerakkan kapan saja untuk mendukung operasi di Selat Sunda. Hal ini terjadi karena belum adanya operasi khusus yang dilakukan untuk pengamanan Selat Sunda. Perlu dukungan anggaran yang cukup dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana. Dalam pemenuhan anggaran tersebut diperlukan pengajuan lewat RKA

KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga) yang diajukan oleh satuan kerja masing-masing instansi.

2. Sumber Daya Manusia

Kekurangan Sumber daya manusia di Lanal Banten juga harus diperhatikan karena dengan adanya kekurangan personel akan menghambat keberhasilan operasi yang dilakukan. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa dari jumlah Daftar Susunan Personel (DSP) Lanal banten yang berjumlah 250 orang hanya di penuhi sebanyak 168 orang atau hanya sebanyak 61 %, strata pangkat yang paling rendah tingkat terpenuhinya adalah strata Perwira yaitu hanya 43 %. Dalam melaksanakan operasi diperlukan personel yang langsung terlibat di satuan operasi (Sops). Sedangkan keterpenuhan pada bagian operasi hanya terpenuhi sekitar 30%.

Dari pembahasan diatas semakin menambah keyakinan peneliti bahwa penguasaan laut dapat dilakukan dengan membangun sistem keamanan dan pertahanan maritim di Selat Sunda

melalui sarana dan prasarana yang baik berupa alat pendeteksi dengan menggunakan teknologi canggih dan penambahan unsur kapal patroli yang beroperasi rutin sehingga dapat mengawasi seluruh wilayah perairan Selat Sunda. Penguatan sistem pertahanan di Selat Sunda dapat juga memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memodernisasi sistem penginderaan terintegrasi antara Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, pengamatan dan Pengintaian (K4IPP) (Kemenhan, 2015).

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Penguatan pertahanan di Selat Sunda bukan hanya tugas dari TNI AL dalam hal ini Lanal Banten semata tetapi juga melibatkan berbagai instansi maritim yang ada disekitar Selat Sunda. Pelaksanaan pengamanan dari sisi kekuatan sipil perlu adanya koordinasi dan suatu badan yang dapat melaksanakan pengawalan dan penjagaan keamanan laut dengan didukung oleh dasar hukum yang jelas. Sehingga akan memberikan sumbangan yang besar dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban serta keselamatan dilaut. Dari hasil penelitian di lapangan dengan beberapa narasumber maka dapat

diambil kesimpulan bahwa instansi tersebut diatas dalam melakukan tugas sehari-hari menunjukkan karakteristik organisasi yang cocok dengan kebijakan peningkatan strategi pertahanan laut di Selat Sunda. Setiap organisasi diatas mempunyai kewenangan sesuai dengan tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun perlu adanya koordinasi yang baik dalam rangka menjaga pertahanan laut di Selat Sunda.

Komunikasi Antar Instansi Pelaksana

Komunikasi adalah salah satu hal yang harus dilaksanakan pada setiap operasi. Dengan komunikasi yang baik dan efektif maka tujuan yang akan dicapai dapat mudah diraih. Pengelolaan geostrategis di Selat Sunda adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral oleh satu instansi saja, perlu keterlibatan berbagai instansi secara terpadu. Hal ini membutuhkan komunikasi antar instansi yang baik.

Komunikasi yang baik melalui pembentukan Crisis Center berbentuk Online maupun pembentukan Pusat Komando Pengendalian Operasi (Puskodalops) Selat Sunda akan mempermudah koordinasi dan

mensinergikan kekuatan Maritim yang ada.

Sikap Para Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan dalam implementasi kebijakan sangat tergantung dari sikap para pelaksananya apakah agen pelaksananya menerima atau menolak terhadap kebijakan publik tersebut.

Sikap para pelaksana dalam menerima atau menolak suatu kebijakan tidak lepas dari pemahaman tentang tujuan dari suatu kebijakan. Pemahaman implementator terhadap tujuan kebijakan yang ditetapkan merupakan motivasi yang kuat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu juga pemahaman yang diperoleh oleh para implementator tergantung juga dari pendidikan yang didapatnya.

Pengaruh Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan yang kuat diperlukan penguasaan laut (Sea Power) yang handal, Geoffrey Till dalam buku *Sea Power : A Guide For The Twenty-First Century*, mengatakan : *Seapower is clearly a larger concept than landpower or airpower, neither of which encompasses the geo-economic dimensions of human*

activity to the extent that seapower does” (Geoffrey, 2009).

Sea Power merupakan konsep yang lebih besar daripada kekuatan darat atau udara, dimana keduanya tidak mencakup dimensi geo-ekonomi dan aktivitas manusia yang menggunakan laut. Kata sea power tidak akan lepas dari kata Maritime power.

1. Lingkungan Sosial

Dalam terciptanya kekuatan maritim yang kuat diperlukan komponen dasar, yaitu masyarakat maritim yang memiliki kesadaran akan pentingnya pertahanan dan keamanan dan juga sumber daya maritim yang mendukung. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa terwujudnya penguatan strategi Pertahanan laut di Selat Sunda membutuhkan dukungan dari seluruh komponen maritim yang berada di Selat Sunda yang bersifat kesestaan, hal ini bertujuan untuk mewujudkan stabilitas keamanan laut yang merupakan tanggung jawab seluruh warga negara.

2. Faktor Ekonomi

Penetapan TSS Selat Sunda merupakan salah satu kebijaksanaan yang diambil untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pelayaran di Selat Sunda, dampak positif lainnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat sekitarnya. Ramainya kapal yang melewati Selat Sunda membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk menambah penghasilan dengan cara memberikan fasilitas bantuan yang dibutuhkan oleh pengguna di Selat Sunda. Antara lain layanan tunda, layanan bunkering, layanan transit termasuk ship to ship transfer, layanan suplai Spare-part kapal, layanan penggantian kru kapal, termasuk layanan asuransi.

3. Faktor Politik

Dukungan pemerintah terhadap penetapan TSS Selat Sunda dapat dilihat dengan adanya keputusan Menteri Perhubungan No. KM 130 tahun 2020 tentang penetapan Sistem Rute di Selat Sunda. melalui peraturan Menteri Perhubungan tersebut maka jelas bahwa TSS Selat

Sunda telah memiliki landasan hukum. Dukungan pemerintah lainnya dalam penetapan TSS Selat Sunda juga terlihat dalam persiapan berlakunya TSS Selat Sunda, mulai dari meng Upgrade VTS Merak sampai dengan menginformasikan ke pada dunia internasional melalui dunia digital maupun penyampaian di pertemuan-pertemuan yang bertaraf internasional tentang berlakunya TSS Selat Sunda.

Lykke mengatakan bahwa strategi terdiri dari tujuan, cara dan sarana (Lykke Jr, 1989), kita dapat merumuskan konsep ini dengan persamaan:

$$\text{Strategi} = \text{Tujuan (Ends)} + \text{Tindakan (Ways)} + \text{Instrumen (Means)}$$

Konsep umum ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan segala jenis strategi militer, politik, ekonomi dan lainnya.

Melalui teori tersebut dirumuskan bahwa strategi penguatan di Selat Sunda adalah dengan mewujudkan “Ends” atau tujuan keamanan, pertahanan, penegakkan hukum serta menjamin keselamatan bagi pengguna Selat Sunda. Dengan melaksanakan amanat sesuai undang-undang yang berlaku sebagai

sarana atau “Means”. Dan memberdayakan komponen maritim dengan keterpaduan kekuatan maritim dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan “Ways” yang digunakan melalui upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam meningkatkan keamanan, penegakkan hukum, serta menjamin keselamatan bagi pengguna laut di Selat Sunda melalui peningkatan sarana dan

prasarana, tata laksana kewenangan, keterpaduan operasi, pelatihan, pendidikan, sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan bela negara kepada masyarakat sekitar Selat Sunda.

Berikut rumusan upaya-upaya untuk penguatan strategi pertahanan laut di Selat Sunda melalui analisa strategis dengan pendekatan Ends, Means, Ways dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Penguatan Strategi Pertahanan Laut di Selat Sunda

End / Tujuan	Means / Sarana	Ways / Upaya
Para pelaksana di lapangan memahami dan dapat melaksanakan kebijakan pertahanan keamanan	Pedoman untuk pelaksanaan tugas serta pedoman Pengawasan Melekat	Penerapan sitem pengawasan melekat agar para pelaksana melaksanakan tugasnya dengan baik. Pembekalan dalam pendidikan instansi masing-masing tentang pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam menjaga keamanan Maritim di Selat Sunda dengan teknologi terkini	Pengajuan melalui RKA K/L untuk peningkatan sarana dan prasarana maritim di Selat Sunda	Penambahan anggaran pada instansi yang membutuhkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana maritim
Terbentuknya Puskodal Ops Selat Sunda	Melalui kebijakan, MOU, Peraturan	Dibentuk Puskodal yang melibatkan seluruh instansi maritim yang berada di sekitar Selat Sunda
Terpenuhinya Sumber daya Manusia untuk pengawakan instansi maritim	Pengajuan untuk penambahan personil pengawak instansi maritim melalui bagian personalia masing-masing instansi	Penambahan jumlah personel dalam perekrutan untuk memenuhi kebutuhan SDM
Berkurangnya pelanggaran di wilayah Selat Sunda, terbentuknya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan laut melalui kesadaran bela negara dan cinta tanah air	Pendidikan Bela Negara	Pemda bekerja sama dengan instansi lainnya melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara kepada masyarakat maritim dan menggalakkan sosialisasi tentang kebijakan penetapan TSS Selat Sunda

Pelaksanaan Operasi khusus pengamanan Selat Sunda	Kebijakan yang dibuat oleh instansi-instansi maritim di Selat Sunda	Perkuatan patroli keamanan dengan pengerahan kapal di sekitar Selat Sunda
---	---	---

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penguatan strategi pertahanan laut di Selat Sunda melalui penetapan TSS Selat Sunda, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi strategi pertahanan laut di Selat Sunda saat ini belum optimal perlu adanya penguatan gelar unsur TNI AL yang beroperasi di Selat Sunda, saat ini hanya ada satu unsur yaitu KAL Anyer yang melaksanakan tugas pengamanan ALKI 1 sehingga kehadiran di Selat Sunda masih sangat kurang, perlu adanya gelar operasi khusus untuk penanganan keamanan di Selat Sunda terkait ramainya lalu lintas pelayaran yang melintasi Selat Sunda. Untuk faktor keamanan yang terkait pelayaran internasional saat ini sudah berjalan lancar, salah satunya adalah dengan adanya penetapan TSS Selat Sunda.
2. Faktor pendukung yang mempengaruhi strategi pertahanan laut di Selat Sunda adalah kebijakan pemerintah tentang Visi Indonesia

untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Selain itu dukungan masyarakat di wilayah Selat Sunda yang menyambut baik kebijakan penetapan TSS Selat Sunda. Juga instansi-instansi maritim yang ada di Selat Sunda telah memiliki koordinasi yang baik, melalui formal maupun informal. Sedangkan faktor penghambat penguatan strategi pertahanan laut di Selat Sunda adalah masih adanya masyarakat nelayan yang menggunakan Selat Sunda yang kurang peduli terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya belum adanya operasi khusus yang dilaksanakan TNI AL untuk melakukan pengamanan Selat Sunda. Kekurangan sarana dan prasarana juga merupakan faktor penghambat untuk penguatan strategi pertahanan laut di Selat Sunda, radar IMSS yang ada di Selat Sunda saat ini siap terbatas. Juga kurangnya sumber daya manusia untuk pengawakan operasi.

3. Upaya yang dilakukan untuk penguatan strategi pertahanan laut adalah dengan penambahan unsur patroli TNI AL melalui operasi khusus pengamanan Selat Sunda. Pengajuan perbaikan radar IMSS yang ada di Selat Sunda agar radar IMSS dapat berfungsi secara maksimal lagi. Pembentukan Puskodalops Selat Sunda, yang beranggotakan seluruh instansi maritim yang ada di Selat Sunda agar penanganan operasi di Selat Sunda dapat terkoordinasi dan bersinergi secara baik. Pemenuhan sumber daya manusia juga harus juga dilaksanakan melalui pengajuan penambahan personel melalui prosedur yang berlaku. Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi maupun pembinaan kesadaran Bela Negara untuk masyarakat di sekitar Selat Sunda. Juga perlu dilaksanakan kebijakan pengawasan melekat bagi personel pelaksana kebijakan dilapangan, agar pelaksanaan tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik.

Rekomendasi

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka rekomendasi yang akan diberikan antara lain :

1. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia perlu adanya harmonisasi regulasi dalam bidang Maritim untuk membuat peraturan yang menjadi pedoman seluruh instansi Maritim dalam pengamanan laut.
2. Kementerian perhubungan dalam hal ini Perhubungan Laut agar membentuk Crisis Center yang berbentuk Online dan Pusat Komando Pengendalian Operasi (Puskodalops) Selat Sunda guna mengintegrasikan kekuatan Maritim di Selat Sunda dalam rangka pengamanan Selat Sunda. Puskodalops Selat Sunda sebagai pusat pengendalian operasi yang dilakukan di Selat Sunda mulai dari bidang operasi pengamanan dan penanganan permasalahan disekitar Selat Sunda.
3. TNI AL dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Laut untuk menambah anggaran dalam rangka

perawatan radar IMSS yang ada di Selat Sunda.

4. Disminpersal untuk menambahkan personel di Lanal Banten, atau memberikan tambahan pendidikan guna meningkatkan kemampuan anggota Lanal Banten melalui LDD, kursus-kursus maupun pendidikan lainnya.
5. Panglima Armada 1 untuk membuat operasi khusus dalam rangka pengamanan Selat Sunda dengan menambah gelar unsur (bantuan KRI) yang akan hadir di perairan Selat Sunda dengan memperhatikan kemampuan kapal/KRI yang akan beroperasi, unsur yang dikerahkan dapat beroperasi pada kondisi karakteristik perairan Selat Sunda.
6. Pemerintah daerah Banten untuk melakukan pembinaan kesadaran Bela Negara kepada kelompok masyarakat Maritim dan menanamkan tentang pentingnya kecintaan terhadap tanah air melalui bidang masing-masing sehingga tercipta daya tangkal terhadap ancaman yang akan muncul.

Daftar Pustaka

- Agostino. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process*. <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/>
- Ajinugroha, S. (2020). *Jangankan China, Kapal Selam Indonesia Malah Pernah Bidik Armada Kuat Inggris untuk Ditenggelamkan Karena Langgar Kedaulatan Negara - Semua Halaman - Sosok*. <https://sosok.grid.id/read/411998804/jangankan-china-kapal-selam-indonesia-malah-pernah-bidik-armada-kuat-inggris-untuk-ditenggelamkan-karena-langgar-kedaulatan-negara?page=all>
- Badriyanto. (2017). *Diambil dari Myanmar, Begini Alur Penyelundupan 1 Ton Narkoba ke Indonesia _ Okezone Nasional*. 20 Juli 2017. <https://nasional.okezone.com/read/2017/07/20/337/1740571/diambil-dari-myanmar-begini-alur-penyelundupan-1-ton-narkoba-ke-indonesia>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian _kualitatif (2nd ed.)*. Kencana.
- Dotulung, A. M. (2020). Fungsi Radar Surveillance IMSS dalam Mendukung Pengamanan Pelayaran di Selat Sunda (ALKI 1). ... *Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, Alki 1, 7–13. <http://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/47>
- Geoffrey, T. (2009). *Seapower A Guide for the Twenty-First Century (2nd ed.)*. Taylor & Francis. <https://www.pdfdrive.com/seapower-a-guide-for-the-twenty-first->

- century-d158702993.html
- Gunawan, D., Barnas, R., & Pertahanan, U. (2018). Strategi pangkalan TNI angkatan laut Banten dalam mendukung pengamanan di alur laut kepulauan Indonesia – i strategy of naval base - banten in favor of security in Indonesia's archipelagic sea lanes – i. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, 4 No.2(Agustus), 71–88.
- Indonesia, M. (2017, July 15). *Pesisir Selat Sunda Rawan Penyelundupan Narkoba*.
<https://mediaindonesia.com/read/detail/113054-pesisir-selat-sunda-rawan-penyelundupan-narkoba>
- Keliat, M. (2009). Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(Juli), 19.
- Kemenhan. (2015). *Buku Putih Pertahanan* (Kemhan (ed.); 1st ed.). Kemhan.
<https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/BPPI-INDO-2015.pdf>
- Kemenhub. (2017). *Pemerintah Segera Tetapkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok « Maritim Indonesia*.
<https://maritimindonesia.co.id/2017/09/pemerintah-segera-tetapkan-tss-di-selat-sunda-dan-selat-lombok/>
- Lykke Jr. (1989). Thmy for MmlWs. *Military Review*, May.
- Mahan., A. T. (1987). *The influence of sea power upon history,1660-1783* (1st ed.). Dover.
<https://www.pdfdrive.com/the-influence-of-sea-power-upon-history-1660-1783-d176016289.html>
- Maritim, J. (2020). *Berlaku 1 Juli 2020, Kemenhub Mulai Sosialisasikan TSS Selat Sunda dan Lombok*.
<https://jurnalmaritim.com/berlaku-1-juli-2020-kemenhub-mulai-sosialisasikan-tss-selat-sunda-dan-lombok/>
- Marsetio. (2014). *Sea Power Indonesia* (H. Purnomo (ed.); 1st ed.). UNHAN.
- Mustari, B., & Barnas, R. (2018). Strategi pertahanan laut nusantara dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, 17–36.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, 1 (2002).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44421>
- Perpres No.16, (2017).
http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/perpres/2017/PERPRES_16_Tahun_2017.pdf
- Suhirwan, S., & Prakoso, L. Y. (2019). *Forum Maritim Kunci Sukses Penanggulangan Ancaman Asimetris di Selat Sunda*. 13–20.
<https://doi.org/10.33510/slki.2019.13-20>